

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membahas terbentuknya politik kewargaan dalam problematika jalur tambang di wilayah Kabupaten Bogor (Studi kasus Kecamatan Parung Panjang, Rumpin, dan Gunung Sindur) dengan menggunakan teori Politik Kewargaan (Kristian Stokke, 2018). Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik triangulasi data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil akhir pada penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas pendistribusian barang hasil tambang di Kabupaten Bogor telah berdampak buruk terhadap masyarakat dan lingkungan setempat hingga terlanggarnya beberapa hak-hak dasar yang dimiliki masyarakat di kecamatan Rumpin, Parung Panjang dan Gunung Sindur yang kemudian membentuk aliansi gerakan kemasyarakatan bernama Aliansi Gerakan Jalur Tambang (AGJT) untuk memperjuangkan haknya. Upaya perjuangan yang dilakukan masyarakat setempat sesuai dengan definisi politik kewargaan oleh Stokke (2018) dan telah berhasil memberikan efek politik. Selanjutnya, disimpulkan juga bahwa pemerintah telah melanggar hak asasi manusia masyarakat setempat.

Kata kunci : Politik Kewargaan, Jalur Tambang, AGJT

ABSTRACT

This research aims to discuss the formation of civic politics in the mining route issues in the Bogor Regency area (Case Study of Parung Panjang, Rumpin, and Gunung Sindur Subdistricts) by using the theory of Civic Politics (Kristian Stokke, 2018). The method used is qualitative with primary and secondary data sources. Data collection techniques were carried out using data triangulation techniques, namely observation, interviews, and documentation. The final results of this research show that the distribution activities of mining goods in Bogor Regency have had a negative impact on the local community and environment, resulting in violations of several basic rights of the community in Rumpin, Parung Panjang, and Gunung Sindur Subdistricts, which then led to the formation of a community movement alliance called the Mining Route Movement Alliance (AGJT) to fight for their rights. The efforts made by the local community align with Stokke's (2018) definition of civic politics and have successfully had a political impact. Furthermore, it is also concluded that the government has violated the human rights of the local people.

Keywords: Civic Politics, Mining Routes, AGJT.